

# MEMBANGUN PLURALISME SISWA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH NON MUSLIM

Oleh: Indah Wahyuni<sup>1</sup>

**Abstrak :** Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non muslim berbeda-beda bentuknya. Sebagian sekolah telah memberikan PAI bagi siswa muslim dan diajarkan oleh guru seagama dalam bentuk mata pelajaran, tetapi sebagian sekolah yang lain memberikan pendidikan agama Islam berupa kegiatan ke-Islam-an. Kebijakan sekolah dalam memberikan pendidikan agama Islam bagi siswa muslim tidak sepenuhnya dilandasi misi ideologi dan ketaatan terhadap perundang-undangan, tetapi lebih didasari pertimbangan misi sosial, terutama marketing sekolah. Problematika Pendidikan Agama Islam di sekolah non muslim cukup beragam, yaitu problem ideologi, sosiologi dan budaya. Adapun faktor mikro yang menghambat PAI di sekolah non muslim adalah; (1) sarana ke-Islam-an masih minim, (2) metode pembelajaran kurang sesuai konteks, (3) materi pembelajaran tidak sesuai kemampuan awal siswa, (4) pembinaan kemenag belum intensif, serta (5) input siswa rendah. Idealitas pendidikan agama Islam di sekolah non muslim dilaksanakan berbasis multikultural, yaitu pendidikan yang tidak doktrinal-tekstualis, tetapi memberikan pemahaman kepada diri peserta didik tentang perbedaan agama dan sistem nilai. Pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan doktrinal-kontekstual dengan memperhatikan sistem nilai dan ajaran agama lain.

## Pendahuluan

Pendidikan agama merupakan hak setiap siswa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Bab V pasal 12 ayat 1 poin a, yang menyatakan setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.<sup>2</sup> Siswa muslim yang berada di sekolah non muslim memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama Islam dan diajarkan oleh guru yang beragama Islam.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Lamongan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Meski secara teoritis dan yuridis telah ditegaskan, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, terutama sekolah non muslim, masih banyak kendala dan problem serius dan komplek, baik dari sisi pelaksanaan maupun metodologi pembelajaran. Kajian Arief Furchan menyatakan metode pembelajaran PAI masih monoton dan menggunakan konsep pembelajaran tradisional sehingga tidak kontekstual.<sup>3</sup>

Hasil studi awal menunjukkan, model pembelajaran PAI pada sekolah non muslim memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum atau madrasah pada umumnya. Hal ini dipengaruhi kebijakan, kurikulum, dan atmosfer ideologi sekolah.

Posisi ideologi selain sebagai tata pengetahuan mendalam, juga dapat dijadikan sebagai pola gagasan khusus yang dinamis serta berfungsi sebagai pengarah tindakan sosial.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, arah pengelolaan sekolah non muslim, sebagai lembaga pendidikan berciri khas agama, cenderung mengacu pada sistem ideologi yang telah menjadi sistem keyakinan. Kondisi ini sesuai kajian Syamsul Arifin, yang menyatakan agama dalam gerakan sosial dapat dikonstruks sebagai ideologi.<sup>5</sup> Pembentukan ideologi berbasis agama dalam lembaga pendidikan pun dapat terjadi dan menjadi fenomena di sekolah berciri khas agama, termasuk sekolah non muslim. Menurut Kuntowijoyo, formalisasi pendidikan agama di sekolah merupakan faktor penting terjadinya konvergensi sosial dan Islam di Indonesia.<sup>6</sup> Problem pembelajaran agama sangat beragam, dan sebagian sekolah belum memberikan pendidikan agama sesuai agama siswa.<sup>7</sup>

Penelitian ini dibatasi pada aspek pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah, bukan pendidikan agama Islam di rumah atau di masyarakat. Batasan

---

<sup>3</sup> Arief Furchan, *Developed Pancasila Muslim: Islamic Religions Education in Public Schools in Indonesia* (Australia: La Trobe University Bundoora Victoria, 1993). Tidak dipublikasikan.

<sup>4</sup> William F. O'neil, *Educational Ideologies*. Penerjemah: Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 33.

<sup>5</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*, Edisi kedua. (Malang: UMM Press, 2010), 274.

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, "Konvergensi dan Politik Baru Islam", dalam Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sypress, 1999), xi.

<sup>7</sup> Listia, *Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Yogyakarta: Interfidei, 2007), 208-209.

masalah di atas dimaksudkan untuk menjadi acuan awal dalam penelitian. Penelitian difokuskan pada kajian tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam pada Sekolah non muslim, problematika pendidikan agama Islam pada sekolah non muslim, dan idealitas pendidikan agama Islam yang sesuai untuk sekolah non muslim.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan studi kasus ini dengan alasan bahwa penelitian kasus bersifat *grounded* serta ideal untuk melakukan sintesis data yang muncul dari konteks dan kancah penelitian, dalam hal ini situs dan latar penelitian.<sup>8</sup> Secara operasional, peneliti menerapkan model multi kasus komparatif, yaitu dengan membandingkan unit kasus berbeda untuk dianalisis secara bersama.

Penelitian ini dilakukan di tiga sekolah non muslim yang ada di Jawa Timur, yaitu SMK Pelayaran Kristen Tuban, SMP Mutiara Bunda Sidoarjo, dan SMP Katholik Wijana Jombang.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) observasi partisipatif, (2) wawancara mendalam, (3) analisis dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis komparatif konstan dengan menerapkan logika induktif. Peneliti membandingkan kejadian-kejadian yang muncul dengan tampilan berbeda sesuai lokus atau kasus di setiap sekolah.<sup>9</sup> Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang dipertajam melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).

### **Konsep PAI di Sekolah Non Muslim**

Pendidikan Islam memiliki makna dan filosofi lebih luas dibandingkan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan Islami yang memiliki komponen-komponen untuk mendukung terwujudnya sosok muslim ideal yang teorinya didasarkan pada al-Qur'an dan *Hadisth*. Menurut Muhaimin,

---

<sup>8</sup> Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), 36.

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data*, 101-104.

pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam.<sup>10</sup>

### 1. Antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam

Istilah pendidikan Islam diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi anak melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>11</sup> Pendidikan Islam menekankan pada orientasi moral dan spiritual dalam proses pembelajaran.

Konsep ini senada dengan definisi M. Yusuf al-Qardhawi, yang menyatakan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya yang meliputi akal, hati, jasmani, rohani, akhlak serta keterampilan.<sup>12</sup> Dalam pemahaman ini pendidikan Islam dimaknai secara totalitas dan bersifat makro. Fondasi pemikiran pendidikan Islam berasal dari konsep teologis Islami yang bersumber dari al-Qur'an, Hadith, dan ijtihad ulama.<sup>13</sup>

Hasil Konferensi Internasional Pendidikan Islam se-dunia pertama di Jeddah tahun 1977 disusun rekomendasi bahwa pendidikan Islam dikonotasikan dengan esensi makna *ta'lim*, *ta'dib*, dan *tarbiyah*. Setiap kata ini memiliki makna harfiah berbeda, namun memiliki esensi makna sama dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu bimbingan untuk menuju kepada ajaran *Ilahiyah*.<sup>14</sup>

Merujuk berbagai definisi di atas, penulis mengambil pemahaman, pendidikan Islam adalah usaha untuk membimbing manusia melalui internalisasi nilai dan ajaran Islam untuk dijadikan pedoman dalam hidup agar menjadi manusia seutuhnya dan menjadikan al-Qur'an dan hadith sebagai rujukan nilai.

Sementara itu, pendidikan agama Islam adalah nama kegiatan atau usaha-usaha dalam mendidikan agama Islam.<sup>15</sup> Secara formal, pendidikan

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 4.

<sup>11</sup> Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 22.

<sup>12</sup> M. Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, terj. Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 157.

<sup>13</sup> Tobroni, *Pendidikan Islam; Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis* (Malang: UMM Press, 2008), 19.

<sup>14</sup> A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 23.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Nuansa Baru*, 4.

agama Islam dipahami sebagai mata pelajaran yang diberikan kepada siswa di setiap satuan pendidikan. Penulis memahami bahwa pendidikan agama Islam adalah kegiatan dan usaha untuk mengajarkan materi agama Islam melalui proses pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Dalam sistem kurikulum nasional, PAI merupakan salah satu dari tiga mata pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia.<sup>16</sup>

Secara terminologi, dasar adalah sesuatu yang dipakai sebagai landasan dalam berpijak, dan dari sanalah segala aktivitas yang berdiri di atasnya akan dijiwai dan diwarnai.<sup>17</sup> Menurut Ahmad D. Marimba, pengertian dasar yang dianalogikan pada suatu bangunan adalah “bagian dari bangunan yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya bangunan itu”.<sup>18</sup>

Dasar pendidikan adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pandangan hidup dan falsafah hidupnya. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek jasmaniah, tetapi juga intelektual serta emosional untuk menjadi manusia yang paripurna. Perilaku manusia hasil pendidikan Islam hakikatnya dijiwai iman dan taqwa kepada Allah.<sup>19</sup> Dalam konsep lain inilah yang disebut pribadi muslim yang kaffah serta memiliki keimanan. Secara operasional, tujuan umum pendidikan agama Islam ialah membimbing anak agar mereka menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal shalih, dan berakhlaq mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara.<sup>20</sup>

## **2. Dinamika Pendidikan Agama Islam di Sekolah**

Praktik pendidikan agama Islam telah berlangsung jauh sebelum

---

<sup>16</sup> Ahmad Munjih Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 6.

<sup>17</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 100.

<sup>18</sup> Marimba, *Pengantar Filasafat Pendidikan Islam*, 41.

<sup>19</sup> Djumransjah dan Malik Karim Amrullah, *Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 68.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 45.

kemerdekaan melalui berbagai lembaga pendidikan. Pada era pra kemerdekaan pendidikan agama Islam dijalankan oleh kelompok-kelompok Islam, yang kemudian terorganisir dalam bentuk organisasi keagamaan. Di antaranya adalah Jami'at Khair, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, al-Irsyad, Perserikatan Ulama, Persatuan Islam (Persis), *al-Washliyah*, dan organisasi keagamaan lain sesudahnya.<sup>21</sup>

Pendidikan Islam di sekolah, secara formal, terjadi setelah kemerdekaan. Secara historis, penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah umum diawali sejak adanya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 17 Desember 1945. Pertemuan ini merekomendasikan agar pendidikan agama mendapatkan tempat yang teratur. Sehingga pada tahun 1946 menteri Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan agar pendidikan agama diberikan kepada semua siswa di sekolah dalam bentuk jam pelajaran.<sup>22</sup> Secara teknis dan pembinaan, pembelajaran PAI di bawah koordinasi menteri agama. Sehingga pelaksanaan PAI di sekolah dibina oleh kementerian agama hingga sekarang. Isu kebijakan pendidikan tersebut menjadi kekuatan tersendiri dalam pengambilan kebijakan pendidikan.<sup>23</sup>

Secara historis, telah terjadi tiga kali perubahan kebijakan pendidikan ditinjau dari paradigma yang digunakan. Kebijakan pendidikan pada Era Orde Lama, Era Orde Baru, dan Era Reformasi. Dalam tiga dekade ini kebijakan bidang pendidikan mengalami perubahan, baik dari sisi perundang-undangan maupun pelaksanaan. Pendidikan agama juga menjadi bagian dalam dinamika perubahan kebijakan tersebut.

Perbaikan kebijakan yang terkait dengan pendidikan agama Islam dilahirkan melalui Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 ditegaskan bahwa pendidikan agama,

---

<sup>21</sup> Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 79-97.

<sup>22</sup> Ali Riyadi, *Politik Pendidikan; Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), 161.

<sup>23</sup> Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah, *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional* (Bandung: Widya Aksara Press, 2009), 2.

pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib di sekolah umum.<sup>24</sup>

Kebijakan pendidikan agama Islam Era Reformasi terkait dengan pendidikan agama Islam di sekolah. Di antaranya adalah melalui UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Bab 5 pasal 12 ayat 1 menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.<sup>25</sup>

Setelah itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada Bab II pasal 3 ayat 1 ditegaskan, setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam.

Dinamika kebijakan pendidikan agama Islam dalam perjalanan bangsa selalu terjadi perubahan-perubahan, sesuai dengan kondisi politik pemerintah. Intinya, pendidikan agama Islam tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan.

## **Temuan dan Pembahasan Penelitian**

Penelitian ini memperoleh beberapa temuan sesuai fokus dan substansi masalah yang diangkat. Secara institusional, ada dua tipologi sekolah non muslim, yaitu tipologi sekolah non muslim terbuka dan sekolah non muslim tertutup, dalam terminologi lain dapat dikatakan moderat dan puritan.

Penelitian ini memperoleh temuan. Pertama, pendidikan agama di sekolah tidak selalu bermotif ideologi, yang ajaran agamanya harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan agama Islam bisa didasarkan pada motif sosiologi, yaitu dengan memosisikan agama sebagai pengetahuan, bukan sebagai sistem nilai yang harus diterapkan sebagai *way of life*. Temuan ini secara tidak langsung mendukung teori Clifford Geertz, yang mengatakan *Religion as a*

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dokumen Kemendiknas, di [www.kemendiknas.go.id](http://www.kemendiknas.go.id). Di akses tanggal 20 Maret 2010

<sup>25</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

*cultural system*, agama sebagai sistem budaya.<sup>26</sup>

Temuan kedua, pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah non muslim membangun dialektika agama, yaitu dialog antara agama Islam dengan agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Temuan ini memperkuat penelitian Listia dkk, yang menyatakan pemberian pendidikan agama secara inklusif di sekolah dapat memudahkan siswa untuk menerima perbedaan.<sup>27</sup> Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian Abdul Mu'ti dan Fajar Riza ul Haq yang menyatakan pendidikan konfessional dan non konfessional berperan penting atas terjadinya konvergensi sosial Islam-Kristen.

Temuan Ketiga, militansi ke-Islam-an pada diri siswa muslim tidak dapat terbentuk secara baik di lembaga pendidikan non muslim. Militansi ini tidak bisa terbangun karena faktor rendahnya pemahaman siswa tentang agama Islam. Dalam istilah Nur syam, tindakan religius pada dasarnya merupakan hasil negosiasi antara satu individu dengan individu lain. Agama merupakan *common knowledge*, sehingga agama merupakan hasil konstruksi bersama melalui pemahaman antar individu yang terinstitusionalisasi.<sup>28</sup> Jika pola ini terjadi dalam interaksi multi agama, maka perilaku dan militansi keagamaan seseorang akan terbangun dalam konsep multi religi.

Temuan keempat, kebijakan pemerintah tentang kewajiban satuan pendidikan untuk memberikan pendidikan agama belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sekolah, yang salah satu faktor penghambatnya adalah faktor ideologi. Pendekatan politik dengan menggunakan perangkat struktural terbukti belum dapat dilaksanakan. Meski Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 telah resmi diundangkan, kenyataannya masih banyak sekolah non muslim yang tidak memberikan hak pendidikan agama bagi siswa muslim.

Terjadi tarik menarik pada dua ranah, yaitu antara misi ideologi dengan misi sosiologi lembaga pendidikan non muslim. Secara historis, salah satu latar

---

<sup>26</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Book, inc Publishers, 1973), 94.

<sup>27</sup> Listia dkk, *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah* (Yogyakarta: Institut Dian dan Interfidei, 2007), 208.

<sup>28</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta:LkiS, 2006), 295.

belakang pendirian sekolah berciri khas agama adalah untuk media dakwah. Keberadaan sekolah menjadi salah satu media untuk mempertahankan eksistensi ideologi kelompok kepentingan melalui tindakan sosial, dalam hal ini pendidikan.

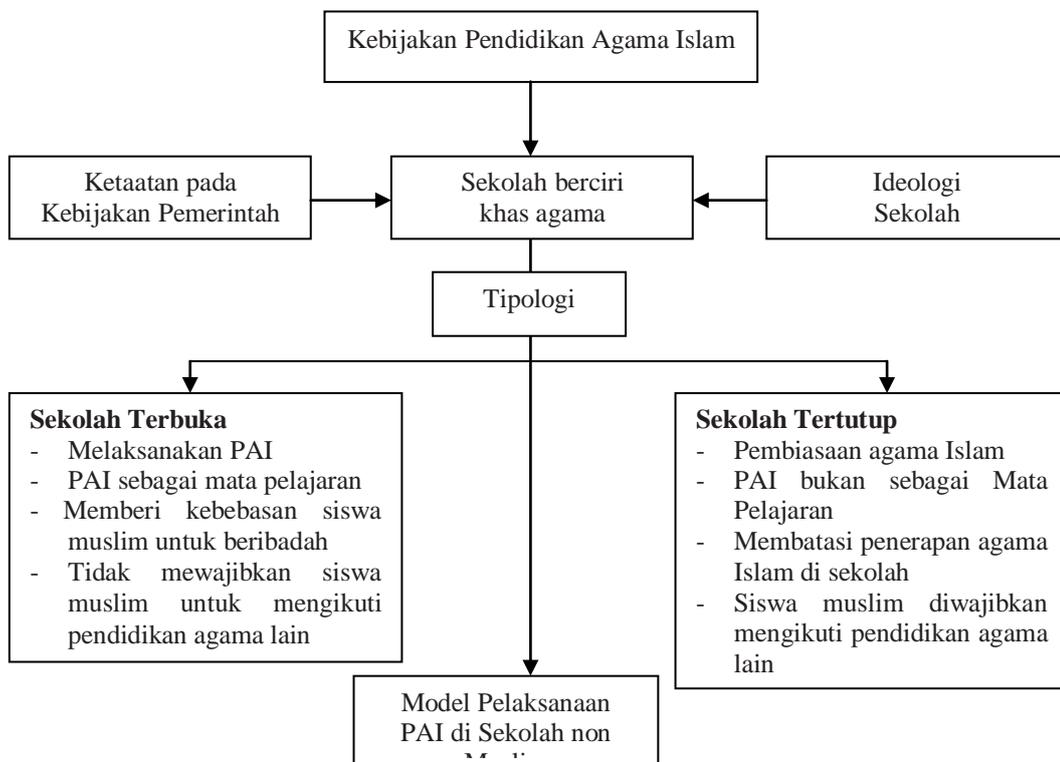
Persoalan ideologi dalam pelaksanaan PAI di sekolah non muslim menjadi temuan menarik dalam penelitian ini. Ada sekolah non muslim yang tetap mempertahankan eksistensi ideologi dalam pengelolaan pendidikan, ada juga sekolah non muslim yang memposisikan ideologi di tengah kebijakan pemerintah dan tuntutan pasar sekolah.

Jenis sekolah pada kategori pertama cenderung menganut konsep ideologi tertutup, dengan tidak menerima masuknya ideologi baru dari luar kepentingannya. Sekolah tipe ini secara praktis, tidak memberikan pendidikan agama Islam secara terbuka dalam bentuk mata pelajaran. Pengelola sekolah masih mewajibkan siswa muslim untuk mengikuti pendidikan agama non muslim.

Sementara itu, sekolah tipe kedua memposisikan ideologi sekolah berada di tengah kepentingan bersama. Dalam tataran praktis, sekolah tipe ini telah melaksanakan pendidikan agama Islam sesuai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pendidikan agama Islam juga telah dijadikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang beragama Islam. Siswa muslim tidak diwajibkan mengikuti pendidikan agama lain, yang menjadi ciri khas keagamaan sekolah.

Melihat berbagai temuan ini, peneliti dapat memaknai bahwa telah terjadi pergeseran misi, dari misi ideologi menuju misi sosiologi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Pelaksanaan pendidikan agama Islam didasari motif sosiologi, secara lebih khusus adalah pertimbangan marketing sekolah. Kebijakan pendidikan agama Islam yang dibuat pemerintah belum direspon secara positif dan belum terlaksana secara optimal karena dipengaruhi faktor ideologi. Secara lebih jelas, alur penerapan kebijakan pendidikan agama Islam yang dipengaruhi ideologi dipaparkan dalam skema berikut ini:

#### **Alur Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah yang dipengaruhi Ideologi**



Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah non muslim tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro pendidikan agama Islam di sekolah non muslim meliputi; (1) faktor ideologi; (2) faktor sosiologi; dan (3) faktor kultur. Ketiga faktor ini menjadi problem tersendiri dalam pendidikan agama Islam di sekolah non muslim.

### **Problem makro PAI di Sekolah non Muslim**

Ketiga problem ini saling berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah non muslim. Ideologi sekolah akan membangun kondisi sosiologi yang mengarah pada ideologi asal. Interaksi sosial di sekolah secara tidak sadar akan terbangun sesuai ideologi yang telah dijadikan pedoman dalam bertindak. Sementara itu, kondisi sosial yang telah terbangun tersebut akan memunculkan budaya-budaya tersendiri di sekolah.

Pada sekolah yang memposisikan ideologi tertutup, maka ketiga faktor ini menjadi problem yang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan agama Islam. Temuan ini senada dengan hasil penelitian Listia dkk yang menyatakan,

pelaksanaan pendidikan agama di sekolah masih menyisakan banyak masalah. Pendidikan agama berada pada lingkaran kepentingan politik dan sistem pendidikan yang dinilai kurang demokratis.

### **Idealitas: Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim**

Temuan penelitian di SMK Pelayaran Kristen Tuban, SMP Mutiara Bunda Sidoarjo, dan di SMP Katholik Wijana Jombang menunjukkan bahwa pendidikan agama selalu dikorelasikan dengan agama lain dalam pembelajaran. Salah satu hasil pendidikan model ini adalah pribadi siswa yang dapat menerima dan menghargai agama lain di lingkungan sekolah. Inilah embrio pluralisme, multikultural dan terbangunnya sikap inklusif di sekolah.

Pendidikan agama tidak diposisikan sebagai doktrinasi ideologi agama yang dianut siswa, tetapi pendidikan agama diekspresikan dalam simbol kebersamaan melalui berbagai kegiatan di sekolah. Nuansa kebersamaan dalam setiap kegiatan inilah yang kemudian membangun komunitas inklusif dan multikultural.

Pendekatan *convensionalism* dalam pengelolaan budaya yang ditawarkan Zainuddin Maliki, nampaknya memiliki kesamaan dengan situasi kancah penelitian. Kondisi multi religi di sekolah non muslim ternyata mampu membentuk *collective conciousness* (kesepakatan bersama) untuk hidup bersama. Kepercayaan dan konsep ideologi agama diterjemahkan dalam nilai-nilai kultural dalam perspektif multikultural dan inklusivisme.

Idealitas pendidikan agama Islam di sekolah non muslim dibangun berdasarkan nilai-nilai multikultural dan keterbukaan. Pendidikan agama Islam yang ideal untuk diterapkan di sekolah non muslim adalah pendidikan agama berbasis multikultural. Pendidikan agama Islam tidak disampaikan secara tekstual-doktriner, tetapi perlu dikembangkan dengan nilai-nilai multikultural.

### **Simpulan**

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non muslim berbeda-beda bentuknya. Sebagian sekolah telah memberikan PAI bagi siswa

muslim dan diajarkan oleh guru seagama dalam bentuk mata pelajaran, tetapi sebagian sekolah yang lain memberikan pendidikan agama Islam berupa kegiatan ke-Islam-an. Kebijakan sekolah dalam memberikan pendidikan agama Islam bagi siswa muslim tidak sepenuhnya dilandasi misi ideologi dan ketaatan terhadap perundang-undangan, tetapi lebih didasari pertimbangan misi sosial, terutama marketing sekolah.

Problematika Pendidikan Agama Islam di sekolah non muslim cukup beragam, yaitu problem ideologi, sosiologi dan budaya. Adapun faktor mikro yang menghambat PAI di sekolah non muslim adalah; (1) sarana ke-Islam-an masih minim, (2) metode pembelajaran kurang sesuai konteks, (3) materi pembelajaran tidak sesuai kemampuan awal siswa, (4) pembinaan kemenag belum intensif, serta (5) input siswa rendah.

Idealitas pendidikan agama Islam di sekolah non muslim dilaksanakan berbasis multikultural, yaitu pendidikan yang tidak doktrinal-tekstualis, tetapi memberikan pemahaman kepada diri peserta didik tentang perbedaan agama dan sistem nilai. Pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan doktrinal-kontekstual dengan memperhatikan sistem nilai dan ajaran agama lain.

### **Implikasi Teoritik**

Penelitian ini memperoleh beberapa temuan sesuai fokus dan substansi masalah yang diangkat. Secara institusional, ada dua tipologi sekolah non muslim, yaitu tipologi sekolah non muslim terbuka dan sekolah non muslim tertutup, dalam terminologi lain dapat dikatakan moderat dan puritan. Kedua tipologi lembaga pendidikan ini terbangun secara situasional, tidak mengenal aliansi basis teologis yang dianut. Misalnya, tidak semua sekolah Kristen terbuka dan tidak semua sekolah Katholik berciri tertutup. Kancah penelitian ini diambil dari sekolah Katholik dan sekolah Kristen yang menggunakan ideologi terbuka, yaitu sekolah non muslim yang memberikan pendidikan agama Islam.

Menurut pengelola sekolah bertipologi tertutup, pemerintah tidak perlu mengatur urusan agama sampai pada level sekolah. Regulasi yang perlu dilakukan pemerintah adalah regulasi administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan,

sedangkan regulasi materi agama menjadi porsi sekolah. Sementara itu, sekolah non muslim terbuka memposisikan agama sebagai urusan publik dan setiap orang memiliki hak untuk mendapat pendidikan agama yang dianut. Meski demikian, kedua tipologi sekolah non muslim tetap membatasi diri bahwa pendidikan agama Islam di sekolah non muslim tidak berimbas pada praktik dan pembudayaan ajaran Islam di lingkungan sekolah. Pendidikan agama Islam di sekolah hanya sebatas pemberian pengetahuan tentang agama, tidak praksis beragama. Penelitian ini memperoleh temuan. Pertama, pendidikan agama di sekolah tidak selalu bermotif ideologi, yang ajaran agamanya harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam bisa didasarkan pada motif sosiologi, yaitu dengan memposisikan agama sebagai pengetahuan, bukan sebagai sistem nilai yang harus diterapkan sebagai *way of life*. Temuan ini secara tidak langsung mendukung teori Clifford Geertz, yang mengatakan *Religion as a cultural system*, agama sebagai sistem budaya.<sup>29</sup> Simbol agama dan sistem simbol merupakan hal esensi dari pikiran manusia.

Pendidikan agama di sekolah non muslim sebatas mata pelajaran yang lebih cenderung dipahami sebagai pengetahuan agama, sehingga sekolah tidak memberi ruang dan waktu yang lebih luas untuk mempraktikkan agama Islam secara sempurna di sekolah non muslim.

Temuan kedua, pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah non muslim membangun dialektika agama, yaitu dialog antara agama Islam dengan agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Dialog yang terbangun secara alamiah dalam interaksi keseharian membangun sikap multikultural dan inklusivisme pada diri siswa. Temuan ini memperkuat penelitian Listia dkk, yang menyatakan pemberian pendidikan agama secara inklusif di sekolah dapat memudahkan siswa untuk menerima perbedaan.<sup>30</sup>

Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian Abdul Mu'ti dan Fajar

---

<sup>29</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Book, inc Publishers, 1973), 94.

<sup>30</sup> Listia dkk, *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah* (Yogyakarta: Institut Dian dan Interfidei, 2007), 208.

Riza ul Haq yang menyatakan pendidikan konfessional dan non konfessional berperan penting atas terjadinya konvergensi sosial Islam-Kristen. Intensitas interaksi sosial antar umat yang berbeda keyakinan dalam lingkungan sekolah serta pemahaman terhadap isi ajaran agama menumbuhkan sikap multikultural positif serta menerima perbedaan antar agama.<sup>31</sup> Kondisi ini sesuai konsep Parsudi Suparlan dalam memaknai multikultural.

Temuan Ketiga, militansi ke-Islam-an pada diri siswa muslim tidak dapat terbentuk secara baik di lembaga pendidikan non muslim. Militansi ini tidak bisa terbangun karena faktor rendahnya pemahaman siswa tentang agama Islam. Di sisi lain, sistem dan peraturan sekolah yang kuat dapat membendung munculnya sikap militansi beragama siswa di lingkungan sekolah. Selain itu juga karena pengaruh pola interaksi dengan siswa non muslim yang berbeda sistem nilai religi dengan siswa muslim. Transaksi perilaku dalam kutub multi agama menjadikan nilai agama terlebur dalam bentuk perilaku sehari-hari. Dalam istilah Nur syam, tindakan religius pada dasarnya merupakan hasil negosiasi antara satu individu dengan individu lain. Agama merupakan *common knowledge*, sehingga agama merupakan hasil konstruksi bersama melalui pemahaman antar individu yang terinstitusionalisasi.<sup>32</sup> Jika pola ini terjadi dalam interaksi multi agama, maka perilaku dan militansi keagamaan seseorang akan terbangun dalam konsep multi religi. Siswa muslim memahami dan menghargai sistem nilai agama lain. Begitu juga sebaliknya. Sikap inilah yang kemudian dapat membendung munculnya militansi keagamaan siswa muslim di sekolah non muslim.

Temuan keempat, kebijakan pemerintah tentang kewajiban satuan pendidikan untuk memberikan pendidikan agama belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sekolah, yang salah satu faktor penghambatnya adalah faktor ideologi. Pendekatan politik dengan menggunakan perangkat struktural terbukti belum dapat dilaksanakan. Meski Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 telah resmi diundangkan, kenyataannya masih banyak sekolah non muslim yang tidak memberikan hak

---

<sup>31</sup> Abdul Mu'ti dan Fajar Riza Ul Haq, *Kristen-Muhammadiyah; Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan* (Jakarta: al-Wasat, 2009), 235.

<sup>32</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LkiS, 2006), 295.

pendidikan agama bagi siswa muslim. Lemahnya implementasi kebijakan pemerintah ini dipengaruhi banyak hal, diantaranya adalah adanya perdebatan bahwa sekolah swasta berciri khas agama memiliki visi dan misi tersendiri, yaitu sekolah sebagai media untuk menjaga eksistensi ideologi kelompok. Di sisi lain, pemerintah sebagai regulator pendidikan berkepentingan untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai agama siswa. Secara umum, belum tegaknya perundang-undangan ini dikarenakan lemahnya organisasi dan pelaksana teknis di lapangan.

Kemenag sebagai institusi yang memiliki kewenangan mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan agama Islam juga belum melangkah secara intensif. Pelaksanaan pendidikan agama Islam akhirnya bersifat opsional bagi lembaga pendidikan non muslim. Sejumlah lembaga pendidikan non muslim yang telah melaksanakan pendidikan agama Islam lebih didasari adanya kesadaran lembaga, bukan karena patuh undang-undang. Hal ini sesuai konsep Arif Rohman yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi keterlibatan pengguna kebijakan (*constituents*) serta pihak yang tergabung dalam kelompok berkepentingan.<sup>33</sup> Jika pengguna kebijakan tidak terlibat implementasi maka kebijakan yang dibuat tidak memiliki nilai positif.

Proposisi yang menjadi temuan di atas menghantarkan peneliti untuk merumuskan sebuah idealitas pendidikan agama Islam di sekolah non muslim, yang didasarkan pada kondisi empiris dari temuan penelitian. Model ideal pendidikan agama Islam di sekolah non muslim adalah pendidikan Islam berbasis inklusif-multikultural. Dalam tataran pembelajaran, materi, metode, serta evaluasi mata pelajaran agama Islam diarahkan pada implementasi konsep keterbukaan dan multikulturalisme. Pendidikan berbasis multikultural dapat menjadi pendidikan agama Islam alternatif di sekolah non muslim.

Konsepsi pendidikan multikultural ini bukan berarti meleburkan nilai agama Islam dalam sistem sosial yang multi religi, tetapi pendidikan agama Islam tetap dibangun dalam karakter ke-Islam-an yang kuat. Pendidikan karakter ke-Islam-an inilah yang akan membangun aqidah atau ranah ideologi siswa muslim

---

<sup>33</sup> Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 160.

sehingga keimanannya menjadi kokoh meski secara individual berada di tengah setting sosial *multi religi*. Salah satu indikatornya adalah tarik menarik antara misi ideologi dan sosiologi tidak membuahkan konflik di sekolah, tetapi membangun inklusivisme komunitas yang multi religi.

## Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*: Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ahmadi, Rulam. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Megeri Malang, 2005.
- Arifin, Syamsul, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*. Edisi kedua, Malang: UMM Press, 2010.
- Arifin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Djumransjah dan Abdul Malik Karim A. *Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*: Bandung, Pustaka Setia, 2006.
- Furchan, Arief. *Developed Pancasila Muslim: Islamic Religions Education in Public Schools in Indonesia*. Australia: La Trobe University Bundoora Victoria, 1993. Tidak dipublikasikan.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Book, inc Publishers, 1973.
- Listia dkk.,. *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah*. Yogyakarta: Institut Dian dan Interfidei, 2007.
- Mu'ti, Abdul dan Fajar Riza ul Haq. *Kristen Muhammadiyah; Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*. Jakarta: al-Wasat, 2009.
- Muhaimian. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Runtuhnya Mito Politik Santri*, Yogyakarta: Sipress, 1999
- Nasih, Ahmad Munjih dan Lilik Nur Kholidah. *Metode dan Teknik Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Nur Syam. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS, 2006.
- O'neil, William F, *Educational Ideologies*. Penerjemah: Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Qardhawi, M. Yusuf . *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, terj. Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Riyadi, Ali. *Politik Pendidikan;Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar- Ruzz ,2006.
- Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional*. Bandung: Widya Aksara Press, 2009.
- Tobroni. *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis, dan Spiritualitas*. Malang:UMM Press, 2008.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dokumen Kemendiknas, di [www.kemendiknas.go.id](http://www.kemendiknas.go.id). Di akses tanggal 20 Maret 2010 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
- Yasin, A. Fatah. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.